I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan, peran, dan fungsi pedesaan dan perkotaan sangat penting sebagai dasar atau basis pembangunan di negara berkembang, karena masyarakat desa dan masyarakat perkotaan terdapat sistem sosial yang berbeda (dualisme sosial).


pengangguran yang dihadapi dan memperbesar jurang antara tingkat pendapatan di sektor-sektor ekonomi yang modern dengan sektor ekonomi tradisional.

Di negara-negara berkembang terdapat istilah ekonomi rakyat yang merupakan suatu konstruksi pemahaman dari realita ekonomi. Di Indonesia untuk memperjelas ekonomi rakyat, lembaga pemerintahan dan swasta membagi pelaku ekonomi kedalam dua kelompok besar, yakni ekonomi konglomerasi dan ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat berbeda dengan ekonomi konglomerasi karena aktivitas ekonominya sepenuhnya milik rakyat, orientasi pasar dan usahanya juga untuk rakyat setempat dan relatif mandiri, ekonomi rakyat akan lebih tepat dipahami sebagai usaha kecil dan mikro.¹

Ada saat ini usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sering menjadi topik pembicaraan sentral, seperti pembicaraan mengenai upaya peningkatan kemiskinan dan pembangunan ekonomi nasional. usaha berskala mikro, kecil, dan menengah sanggup memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, khususnya dalam menyediakan kesempatan kerja dan juga merupakan sumber yang cukup besar bagi penerimaan negara. Usaha mikro sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003, adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia, memiliki hasil penjualan paling banyak 100 juta rupiah dan dapat menerima kredit dari bank maksimal 50 juta rupiah. Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1995, adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak satu

¹ www.synu.or.id/newslet/2004
miliar rupiah, serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Usaha menengah sebagaimana dimaksud

Hukum Undang-Undang No. 10 tahun 1998, adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah.  

Sedangkan krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang collapse, meningkatnya suku bunga, inflasi.

Krisis moneter tidak membawa dampak yang buruk bagi perkembangan UMKM, tetapi memperluas UMKM dikarenakan saat terjadinya krisis moneter UMKM memperbaharui ketahanan yang luar biasa dan tetap berkembang sampai saat ini.

Bertambahnya jumlah UMKM di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1, pada tahun 2003 jumlah usaha kecil mendominasi sebesar 42.326.519 unit.

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Sektor Ekonomi</th>
<th>Skala Usaha (unit)</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kecil</td>
<td>Menengah</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan</td>
<td>24.735.693</td>
<td>1.791</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pertambangan dan Penggalian</td>
<td>379.141</td>
<td>1.326</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Industri Pengolahan</td>
<td>2.560.846</td>
<td>7.845</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Listrik, Gas, dan Air</td>
<td>9.185</td>
<td>953</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Bangunan</td>
<td>170.359</td>
<td>9.847</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Pardagangan, Hotel, dan Restoran</td>
<td>8.456.064</td>
<td>21.269</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Pengguratan dan Komunikasi</td>
<td>2.963.768</td>
<td>3.616</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Perusahaan</td>
<td>29.508</td>
<td>6.502</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Jasa-jasa</td>
<td>3.021.955</td>
<td>8.837</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td></td>
<td><strong>42.326.519</strong></td>
<td><strong>61.986</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Departemen Koperasi, 2004

Masalah klasik yang dihadapi dalam dunia usaha pada umumnya adalah permodalan ketika akan melakukan pengembangan usaha. Demikian pula halnya dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) khususnya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usahanya, yaitu kurangnya akses terhadap permodalan, kemitraan, serta peluang usaha, permasalahan tersebut dapat menghambat tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan mikro. Pada umumnya orang berpendapat bahwa keberhasilan usaha diperlukan dana yang mencukupi, dimana makin besar dana yang tersedia memungkinkan keberhasilan usaha baik di bidang produksi dalam ekonomi riil maupun dalam perdagangan, karena permodal besar biasanya mampu bertahan dalam menghadapi persaingan di pasar.

Untuk merealisasikan dana yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha kecil dan mikro maka diperlukan peran dari lembaga keuangan, dimana fungsi dari lembaga finansial adalah sebagai intermediasi yang menghubungkan peranan perbankan dengan unit-unit usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor-sektor usaha yang produktif. Melalui fungsi tersebut dana yang tidak produktif dapat diolah menjadi suatu dana yang dapat meningkatkan produktivitas atau profit dari unit-unit usaha. Penghimpunan dana masyarakat dilaksanakan dengan cara menyediakan suatu deposito, tabungan, dan kredit sebagai suatu wadah penyaluran dana yang dialokasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana.

Kredit merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat penting dalam membiayai kegiatan suatu usaha. Usaha mikro, kecil, menengah dan besar
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 2: Perkembangan Kupedes Nasional Tahun 1997-2001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Realisas Kupedes</td>
</tr>
<tr>
<td>(Dalam Rupiah)</td>
</tr>
<tr>
<td>2.709.182</td>
</tr>
<tr>
<td>78.67</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ketercakapan usaha kecil dan mikro adalah fokus yang diperhatikan oleh BRI Unit, yang tersedia di desa-masyarakat dan usaha usaha mikro. BRI Unit di Indonesia merupakan alat yang bisa memberikan sumbangan bagi peningkatan usaha kecil dan mikro. Dalam penerapan, BRI Unit juga memberikan bantuan kepada usaha kecil dan mikro yang membutuhkannya. Sehingga, usaha kecil dan mikro semakin diperhatikan dan diterima di masyarakat.
merupakan contoh sukses sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam menghimpun dana, karena sampai saat ini BRI Unit merupakan LKM yang benar-benar mandiri dengan pembiayaan kredit yang seluruhnya berasal dari simpanan masyarakat (Retnadi, 2006).

1.2. Penyusunan Masalah

Kupedes merupakan salah satu produk pinjaman yang dikeluarkan oleh BRI dan merupakan kredit yang disalurkan bagi bisnis di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Penyaluran Kupedes oleh BRI dimulai setelah pemerintah menghembuskan paket Bimbingan Massal (BIMAS) pada bulan April 1985. Menurut Retnadi (Retnadi, 2006) pada awalnya KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan) merupakan kredit yang diberikan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha-usaha kecil dan mikro di pedesaan yang disalurkan melalui BRI Unit Desa, tetapi usaha kecil dan mikro juga banyak ditemukan di daerah perkotaan, sehingga untuk menangkap peluang tersebut BRI Unit juga dibuka di berbagai daerah perkotaan.

Semakin berkembang perindustrian di daerah perkotaan dan pedesaan, dan meningkatnya usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah mengakibatkan tumbuhnya persaingan yang ketat sehingga suatu perusahaan harus mampu bertahan dan lebih mengembangkan usahanya. Untuk mempertahankan eksistensinya perusahaan harus memiliki pondasi yang kuat seperti modal yang besar yang dapat digunakan untuk menjalankan perusahaan, serta mengembangkan dan mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas produk. Berdasarkan besaran penyaluran KUPEDES di setiap BRI Unit pada BRI cabang
Bogor pada tahun 2004 (Lampiran 1), BRI Unit Citeureup menyalurkan

KAPEDES terbesar pada sektor perindustrian. Ini menyatakan bahwa di wilayah

Citeureup banyak industri-industri yang sedang tumbuh dan berkembang sehingga

perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah dalam

mengajukan kredit.

Di halnya dengan wilayah Cianjua yang merupakan daerah pedesaan.

Di Cianjua penyaluran KUPEDES untuk sektor pertanian menduduki peringkat

keenam untuk keseluruhan BRI Cabang Bogor. Wilayah Cianjua termasuk ke

dalam wilayah pedesaan, tetapi dalam penyaluran Kupedes tidak sebesar wilayah

Parung dan Cibungbulang, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang

mempengaruhi permintaan KUPEDES. Dengan demikian dapat dilihat adakah

desa yang memiliki keterstruktur berprofesi sebagai wiraswasta dan karyawan.

Perbedaan dengan wilayah Cianjua yang merupakan daerah pedesaan,

penyaluran kredit ke sektor pertanian mencapai lebih dari enam milyar rupiah

(Lampiran 2), tetapi mengalami penurunan tiap bulannya. Walaupun Cianjua

merupakan wilayah pedesaan, akan tetapi jumlah permintaan Kupedes pada sektor
pertanian lebih kecil dibandingkan dengan jumlah permintaan pada sektor perdagangan, yang merupakan jumlah permintaan Kupedes terbesar pada wilayah Ciampea dengan besarnya kredit mencapai lebih dari tiga milyar rupiah. Hal ini dapat diketahui bahwa UMKM tidak hanya tumbuh dan berkembang pada wilayah perkotaan dan perindustrian, tetapi juga dapat tumbuh dan berkembang di wilayah pedesaan.

Untuk meningkatkan jumlah pinjaman dan pencapaian target permintaan Kupedes, BRI perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan Kupedes tersebut. Ada beberapa usaha yang telah dilakukan oleh BRI yaitu dengan memberikan kemudahan pelayanan, dekat dengan nasabah, bunga flat dan juga jangka waktu yang ditentukan sendiri oleh nasabah. Pada awal tahun 2002 BRI mengeluarkan kebijakan meningkatkan plafond maximum Kupedes yang semula ini hanya 25.000.000 rupiah menjadi 50.000.000 rupiah, tetapi pada tahun 2006 BRI mengeluarkan kebijakan meningkatkan plafond maximum Kupedes dari 50.000.000 rupiah menjadi 100.000.000 rupiah. Peningkatan plafond maximum Kupedes diharapkan dapat meningkatkan permintaan Kupedes oleh nasabah.

Untuk batas maximum Kupedes 100.000.000 rupiah belum direalisasikan di setiap BRI Unit di seluruh Indonesia, yang sudah merealisasikannya antara lain BRI cabang Bogor, BRI cabang Cibinong, BRI cabang Jakarta, dll. Untuk BRI Unit Citeureup akan merealisasikannya pada awal bulan Agustus, sedangkan untuk BRI Unit Ciampea belum dapat merealisasikannya.}

3 Wawancara dengan Kepala Unit BRI unit Citeureup
Untuk dapat mencapai peningkatan permintaan Kupedes, BRI perlu mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Kupedes di tingkat nasabah. Dengan demikian BRI dapat menentukan nasabah yang tepat dan jumlah Kupedes yang tepat untuk nasabah tersebut. Selain itu peningkatan permintaan Kupedes di pedesaan dan di perkotaan disebabkan oleh tingginya tingkat kebutuhan masyarakat wilayah Citeureup dan Ciampea untuk memperbaiki dan mengembangkan usahanya serta adanya kemudahan-kemudahan prosedur yang diberikan oleh BRI Unit Citeureup dan BRI Unit Ciampea dalam memberikan Kupedes.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperoleh perumusan masalah yang akan dibahas di penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah karakteristik nasabah Kupedes BRI Unit Ciampea dan Citeureup?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan Kupedes di BRI Unit Citeureup dan BRI Unit Ciampea?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Menganalisis karakteristik nasabah Kupedes di BRI Unit Citeureup dan BRI Unit Ciampea.
1.3.2. Manfaat Penelitian

Pengidentifikasi yang berkepentingan, baik penulis, mahasiswa, maupun BRI Unit Cimaha, ditargetkan untuk penelitian ini. Dengan demikian, penelitian dapat bermanfaat untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pinjaman Kupedes, sehingga dapat menentukan target penyaluran Kupedes.